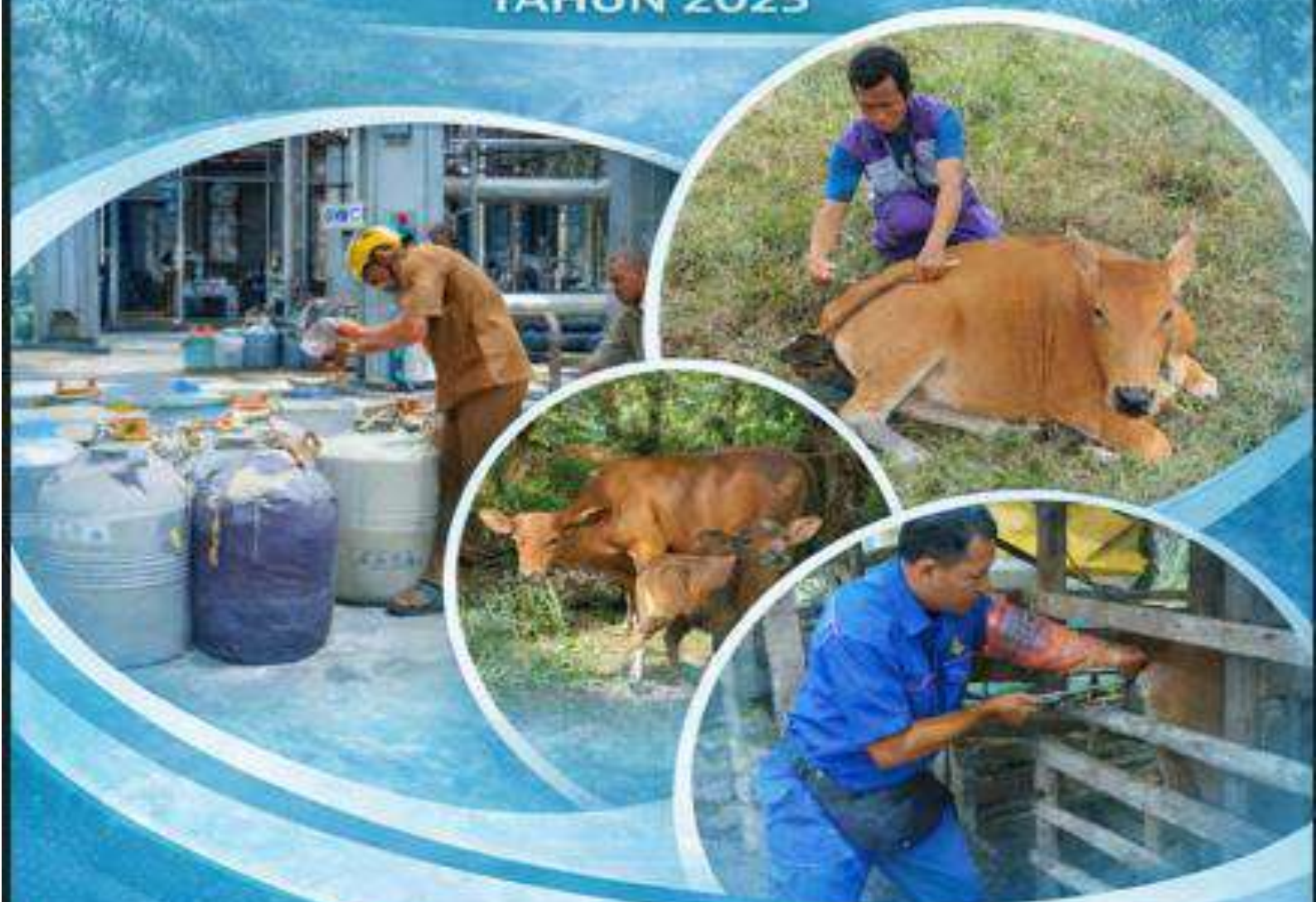




Nomor : 000.7.5/139/DPKH/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pekanbaru, 27 Februari 2026

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, Februari 2026
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Dra. Hj. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Sumber Daya Manusia	6
1.4. Sarana dan Prasarana	7
1.5. Fungsi dan Tugas	8
1.6. Aspek Strategis Organisasi	17
1.7. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	18
1.8. Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20
1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	26
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	28
2.1. Rencana Strategis	28
2.2. Perjanjian Kinerja	32
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
A . Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	34
B. Realisasi Anggaran	77
BAB IV. PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Langkah Strategis	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 (orang).....	7
Tabel 1.3. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	8
Tabel 1.4. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau.....	19
Tabel 1.5. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau.....	20
Tabel 1.6. Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau.....	21
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2026.....	29
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2026.....	29
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.....	31
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau.....	33
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Produksi Daging Tahun 2025.....	36
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Daging Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	37
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.....	38
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional.....	38

Tabel 3.6.	Populasi Ternak.....	40
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran.....	41
Tabel 3.8.	Target dan Realisasi IB tahun 2025.....	44
Tabel 3.9.	Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	49
Tabel 3.10.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	49
Tabel 3.11.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Daging.....	51
Tabel 3.12.	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Status Kesehatan Hewan Tahun 2025.....	54
Tabel 3.13.	Perbandingan Capaian Kinerja Status Kesehatan Hewan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	54
Tabel 3.14.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.....	55
Tabel 3.15.	Pelayanan Kesehatan Hewan.....	58
Tabel 3.16.	Perbandingan Target, Capaian dan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 s/d 2025.....	59
Tabel 3.17.	Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan.....	64
Tabel 3.18.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Status Kesehatan Hewan	65
Tabel 3.19.	Capaian Kinerja Produk Asal Hewan yang ASUH.....	67
Tabel.3.20.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	67
Tabel 3.21.	Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH	73
Tabel 3.22.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH	74
Tabel 3.23.	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH	76
Tabel 3.24.	Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
Gambar 1.2. Struktur Organisasi UPT. Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	5
Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	6
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu.....	7
Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Tahun 2022-2025.....	38
Gambar 3.2. Grafik Produksi Ruminansia Tahun 2021-2025	39
Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Unggas Tahun 2022-2025	39
Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas	40
Gambar 3.5. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan dan Kelahiran.....	42
Gambar 3.6. Pelayanan Inseminasi Buatan Tenak.....	46
Gambar.3.7. Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Peternakan Oleh Petugas	47
Gambar 3.8. Perkembangan Status Kesehatan Hewan.....	55

BAB. I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Fungsi dan Tugas
- 1.4. SDM Organisasi
- 1.5. Sarana Prasarana
- 1.6. Aspek Strategis Organisasi
- 1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi
- 1.8. Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga pada Rencana Strategis tahun 2025-2026. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1.1. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Bidang Produksi Peternakan.
- c. Bidang Kesehatan Hewan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Agribisnis Peternakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

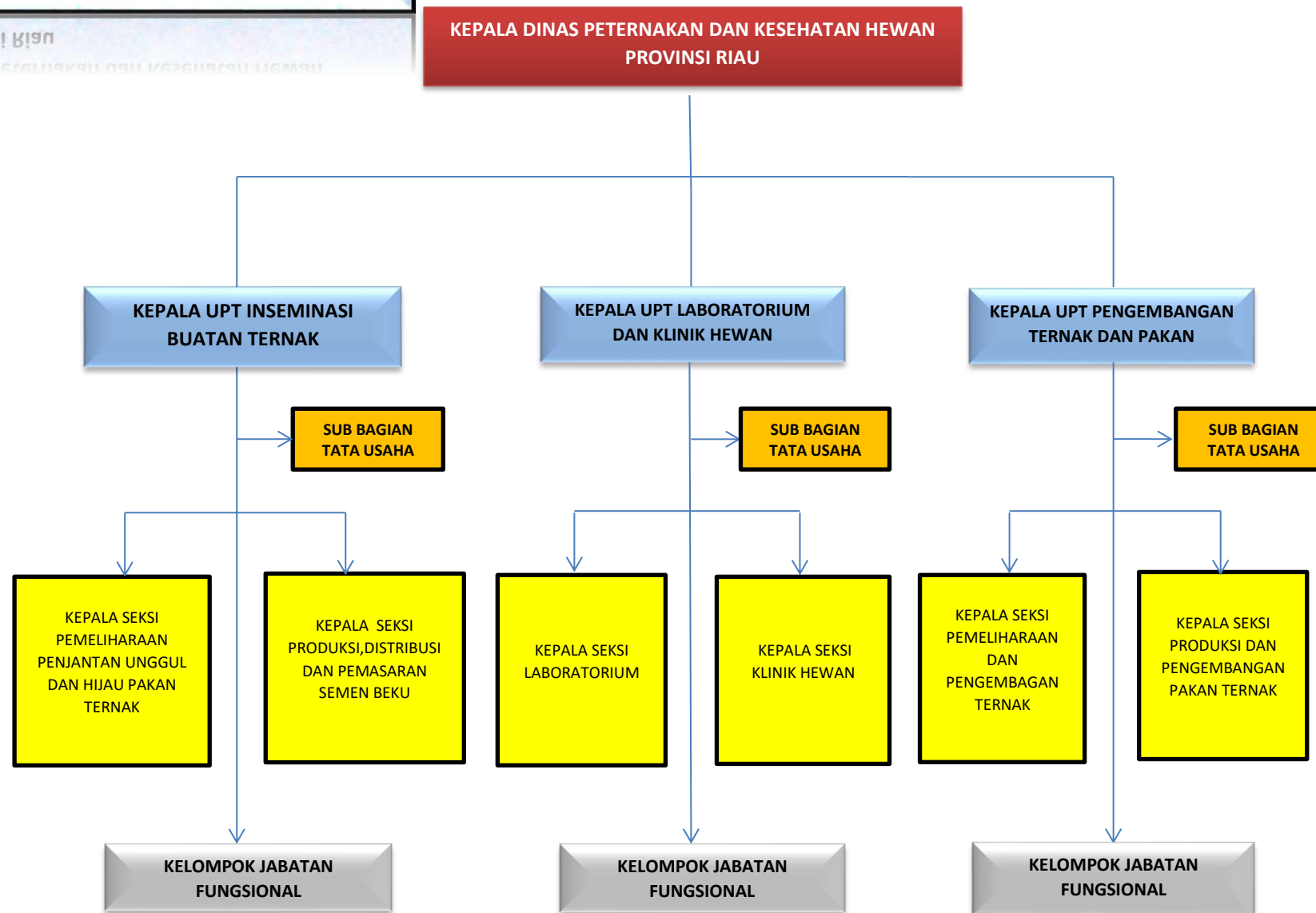
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas memiliki 3 (tiga) UPT yakni UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, UPT. Inseminasi Buatan Ternak dan UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas
Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**



Gambar 1.2. Struktur Organisasi UPT Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

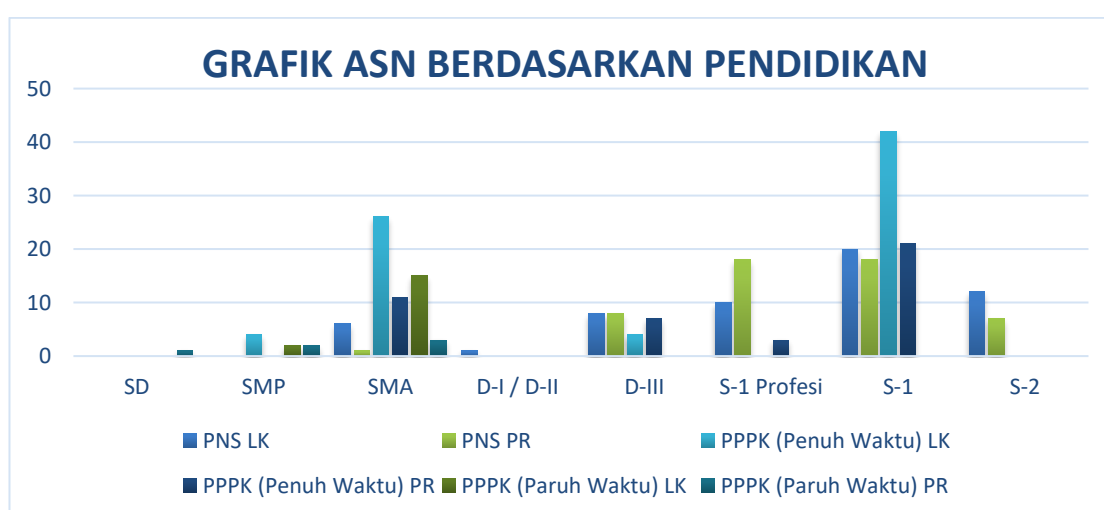


1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2025 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 250 orang ASN yang terdiri dari 109 orang PNS dan 141 orang PPPK. Rincian ASN terdiri dari 19 orang pejabat struktural (PNS), 120 orang pejabat fungsional tertentu, 111 orang pejabat fungsional umum. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

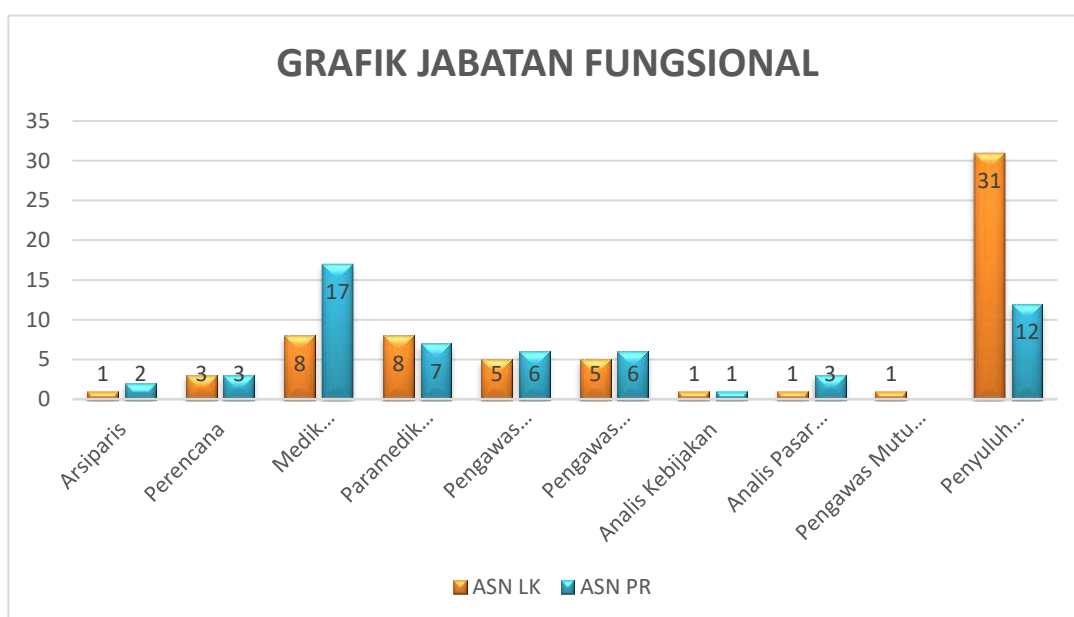
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ASN						JUMLAH
		PNS		PPPK (Penuh Waktu)		PPPK (Paruh Waktu)		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	SD						1	1
2	SMP			4		2	2	8
3	SMA	6	1	26	11	15	3	62
4	D-I / D-II	1						1
5	D-III	8	8	4	7			27
6	S-1 Profesi	10	18		3			31
7	S-1	20	18	42	21			101
8	S-2	12	7					19
JUMLAH		57	52	76	42	17	6	250
TOTAL		109		141				250



Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 (Orang)

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH FUNGSIONAL		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	FUNGSIONAL ARSIPARIS	1	2	3
2	FUNGSIONAL PERENCANA	3	3	6
3	FUNGSIONAL MEDIK VETERINER	8	17	25
4	FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER	8	7	15
5	FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN	5	6	11
6	FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK	5	6	11
7	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN	1	1	2
8	FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL TERNAK	1	3	4
9	FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	1		1
10	FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN	31	12	43
	TOTAL	64	57	121



Gambar 1.4. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

1.4. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 1.3 berikut ini :

Tabel.1.3. Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Baik	Kondisi Rusak/Jelek
1	Gedung Kantor	5	5	
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	9	6	2
4	Bangunan Gudang Instalansi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	2	2	
6	Aula	2	2	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	28	27	1
13	Kendaraan Roda 3	8	2	6
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	30	24	6
17	Induk Sapi	53	53	
18	Komputer PC	108	99	9
19	Note Book	24	10	14
20	Mesin Fotocopy	3		3

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025

1.5. Fungsi dan Tugas

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis

Peternakan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

- a) Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum.
- b) Untuk pelaksanaan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian

dan umum;

- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Peternakan

- a) Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan budidaya Ternak, Perbibitan Ternak, Pakan Ternak, Teknologi reproduksi ternak, Pengembangan Kawasan Peternakan dan Sistem Integrasi Ternak Tanaman.
- b) Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Produksi Peternakan;
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang produksi peternakan;
 - pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya

ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;

- pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan pada Bidang Produksi Peternakan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Produksi Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan

a) Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan.

b) Untuk pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Hewan;
- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Hewan;
- pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit

hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;

- pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Hewan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

a) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan tugas yang terkait dengan higiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan.

b) Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis

- a) Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan.

- b) Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Agribisnis Peternakan;
 - penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Agribisnis Peternakan;
 - pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Agribisnis Peternakan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Agribisnis Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Tugas dan Fungsi UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
- a) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

b) Untuk melaksanakan tugas, UPT Laboratorium veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian Tata usaha, seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(7) Tugas dan Fungsi UPT. Inseminasi Buatan Ternak UPT Inseminasi Buatan Ternak

a) UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.

b) Untuk melaksanakan tugas, UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(8) Tugas dan Fungsi UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

- a) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.
- b) Untuk melaksanakan tugas, UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada sub bagian Tata usaha seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit dan atau benih hijauan pakan ternak dan

pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak;
dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1.6. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke tiga yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK.

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, kontribusi sub sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan populasi, produksi

dan produktivitas ternak di Riau sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan terutama kawasan integrasi sapi-sawit dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama beberapa tahun terakhir masih lamban. Produksi daging terutama produksi daging ruminansia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan daging dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Saat ini pemenuhan kebutuhan daging ruminansia terutama sapi masih dominan didatangkan dari luar. Dari total produksi daging ruminansia di Provinsi Riau tahun 2025, produksi daging ruminansia lokal hanya sebesar 20%, selebihnya merupakan ternak yang didatangkan dari luar dan dipotong di Provinsi Riau. Dan untuk memenuhi kebutuhan daging ruminansia disamping daging segar juga dipenuhi dari daging beku yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Rendahnya produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau salah satunya dikarenakan jumlah populasi ternak yang masih sedikit. Peningkatan populasi ternak di Riau pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, *Good Farming Practice* tidak diterapkan dengan baik, dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

Tabel 1.4. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
			Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas
Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas			
Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak			
Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani			
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal

				Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal		Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
				Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
				Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

1.8. Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Nomor 182/LHE/INSP-RIAU/IR.III/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 atas evaluasi tahun 2024 mendapatkan nilai 75,20 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 1.5. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	16,80
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4	Evaluasi Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi AKIP pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merekomendasikan beberapa hal terkait catatan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel.1.6. Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	Perencanaan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah mengacu pada dokumen perencanaan strategis, yaitu Perubahan Renstra 2019-2024, perubahan Renja Tahun 2024, serta dokumen yang diperjanjikan tahun 2024 yang masing-masing menetapkan target tahunan bagi tiga Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara target dalam dokumen perubahan perencanaan strategis, Perubahan Renja dan Perjanjian Kinerja (PK), khususnya untuk indikator Produksi Daging. Target PK Tahun 2024 sebesar 80.632 ton lebih tinggi dari target Renja (63.303 ton) dan Renstra (62.535 ton), yang tidak didukung dengan revisi dokumen perencanaan Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan, dan meskipun perencanaan telah mendukung pencapaian kinerja, namun masih terdapat kekurangan pada aspek dinamisnya rencana aksi dan konsistensi dokumen. Hal ini ditandai	a. Merumuskan sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, guna memastikan keterkaitan yang utuh dan berjenjang (cascading) dari tingkat organisasi hingga tingkat individu; b. Merumuskan indikator kinerja lintas perangkat daerah (crosscutting) dengan perangkat daerah lain untuk keterpaduan program pencapaian sasaran pembangunan daerah di RPJMD; c. Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline;	a. Sasaran kinerja dan indikator kinerja pada dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja sudah konsisten dan sudah memiliki keterkaitan yang utuh dan berjenjang dan dapat dilihat pada cascading mulai dari tingkat organisasi hingga individu. b. Pada Rancangan akhir Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2029 telah dirumuskan indikator kinerja dan lintas perangkat daerah lain untuk keterpaduan pencapaian sasaran Pembangunan daerah di RPJMD. Dikumen Renstra sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (dapat dilihat pada cascading yang telah disusun dan dijadikan dasar dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan juga telah menyusun crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Jadi tidak hanya crosscutting antar OPD tapi juga crosscutting antar bidang di

		dengan revisi terhadap target telah dilakukan secara de facto dalam PK, dan tidak secara formal dalam dokumen Renja atau Renstra. Akibatnya, perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara konsisten untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. a. Belum sepenuhnya tergambar hubungan kerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang (cascading); b. Tugas dan fungsi perangkat lain yang berkaitan (crosscutting) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum terbangun secara cukup		lingkup dinas. Contoh pada Dinas PKH memiliki Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menjadi tanggungjawab 2 bidang yakni bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesmavet. c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah terukur, realistis dapat dicapai dan menggunakan data capaian tahun sebelumnya sebagai baseline. Ini dibuktikan dengan menetapkan target untuk tahun berikutnya lebih besar dari target yang direncanakan bila target telah dicapai pada tahun tersebut.
2	PENGUKURAN KINERJA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupload dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu dengan Indikator Kinerja yang menggambarkan outcome. Pengumpulan dokumen perencanaan dan penginputan data capaian indikator sudah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi siapadia.riau.go.id. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut: 1) Pengukuran kinerja belum menjadi	a. Melaksanakan pemantauan kinerja terhadap rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat dan handal dan hasil pemantauan digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan atau rencana aksi; b. Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan	a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan pemantauan terhadap rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja setiap triwulan. Masing-masing bidang dan UPT melaporkan hasil evaluasi kinerja dan laporan realisasi rencana aksi sesuai dengan format yang telah dibagikan dan selanjutnya direkap dan disusun menjadi laporan kinerja dan laporan monev rencana aksi dinas. Pemantauan dan evaluasi kinerja juga dilakukan secara berjenjang mulai dari pimpinan hingga staf setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi ekinerja

		dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan, penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan dalam penyesuaian (refocusing) organisasi; 2) Belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja dan setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara secara berjenjang sehingga pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dan analisis efisiensi dalam mencapai kinerja; 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja belum optimal sehingga sistem informasi manajemen kinerja yang ada belum mendukung pemantauan real-time	melibatkan seluruh unit kerja (bagian/subbagian). Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan tersebut memuat saran pimpinan terkait penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyesuaian anggaran/analisis efisiensi dalam mencapai kinerja;	yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dinilai terkait rencana aksi masing-masing individu serta realisasinya dengan melampirkan evidence terkait capaian kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dinas. b. Monev Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan secara berkala (triwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja. Penyusunan Laporan diawali dengan pengumpulan data kinerja dari masing-masing bidang dan UPT dan selanjutnya dilakukan rapat evaluasi dengan mengundang Kepala Bidang/UPT serta Ketua Tim kerja. Rapat evaluasi membahas capaian kinerja dan rencana aksi serta kendala/hambatan dalam pencapaian target dan solusi/tindak lanjutnya. Hasil rapat evaluasi selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Dinas yang memuat saran pimpinan terkait penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyesuaian anggaran/analisis efisiensi dalam mencapai kinerja. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) Dimana terdapat penyesuaian dalam target dan pengukuran kinerja berdasarkan kebijakan nasional, Kementerian atau
--	--	---	---	---

				pemerintah daerah yang baru diiterbitkan dan hasil dari monitoring evaluasi triwulan, sehingga dokumen perencanaan kinerja mengalami pergeseran atau perubahan.
3	PELAPORAN KINERJA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun kualitas laporan belum maksimal dikarenakan evaluasi pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala, penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai dan informasi dalam laporan kinerja belum berpengaruh terhadap budaya organisasi	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun berikutnya dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja, dengan menyertakan data pendukung dan bukti capaian secara sistematis (evidence-based);	Dinas telah menyiapkan data-data pendukung dan bukti capaian secara sistematis (<i>evidence-based</i>) untuk digunakan dalam analisis yang lebih komprehensif terhadap capaian kinerja untuk penyusunan LKJIP tahun berikutnya,
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Dinas PKH Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas	-	-

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sesuai standar yaitu belum dilakukannya evaluasi kinerja internal secara berjenjang pada seluruh bidang/subbidang yang dilakukan secara berkala, dan hasil evaluasi internal tersebut digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan atau rencana aksi.		
--	--	---	--	--

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

Bab II berisi :

1. Rencana Strategis Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Anggaran 2025

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau juga harus memperhatikan

Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan, serta memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Rencana Strategis Transisi (Renstra Transisi) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2026 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam mencapai tujuan Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan. Dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2026 tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan dinas yakni **Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	
				2025	2026
1	Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	84.768	87.311
		Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	98,1	98,2
			Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	5%

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 3 (tiga) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025– 2026

Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan	
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya produksi daging	1.	Peningkatan Populasi	1.	Penigkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan
					2.	Menyediakan Pakan Berkualitas
					3.	Menyediakan Benih/Bibit ternak berkualitas
					4.	Menyediakan indukan dan pejantan berkualitas
					5.	Optimalisasi pemanfaatan limbah dan produk samping perkebunan kelapa sawit
					6.	Melaksanakan penanggulangan gangguan reproduksi ternak

			2.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternak	1.	Meningkatkan Keterampilan Peternak dalam GFP
					2.	Menfasilitasi Permodalan Kelembagaan Peternak dan pelaku usaha peternakan
			3.	Peningkatan Prasarana Peternakan	1.	Penyediaan prasarana produksi peternakan
					2.	Penyediaan Prasarana UPT
	2	Terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	4.	Penurunan angka kematian ternak	1.	Peningkatan Pelayanan Veteriner
					2.	Vaksinasi
					3.	Pengamatan penyakit hewan
					4.	Pengawasan Peredaran Obat Hewan
					5.	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan
					6.	Pembinaan kelembagaan keswan
			5.	Peningkatan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	1.	Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Produk Hewan yang beredar di Masyarakat
					2.	Meningkatkan Penerapan Kesejahteraan Hewan di Unit Usaha
					3.	Audit/Survelance/Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

2.1.3. Program Kegiatan

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2025-2026) sudah disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau.

Tabel 2.3 yang menggambarkan Indikator Kinerja Program Utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak - Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada DPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program prioritas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri 4 program yaitu :
 - a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Penyuluhan Pertanian
- 2) Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - b) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - c) Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - e) Penataan Prasarana Pertanian
 - f) Penjaminan Kesehatan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- g) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - h) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona Kompetemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - i) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
- 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebanyak 1 program dengan 4 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan :
- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Riau juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk Program Program Dukungan Manajemen.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	84.768 Ton
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase status kesehatan hewan (%)	98,77%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%
3	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Nilai SAKIP	76,5 (BB)

Pada tahun 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 4 indikator kinerja kegiatan (Terlampir). Indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 61.672.958.978,- melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp 45.236.421.259,-. Sedangkan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.137.722.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Dinas
Pernakan dan
Kesehatan Hewan
- B. Realisasi Keuangan

A. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan p enilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator produksi daging, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator persentase status Kesehatan hewan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.
- (3). Pada indikator persentase produk asal hewan yang ASUH, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

SASARAN I MENINGKATNYA PRODUKSI DAGING

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator Produksi daging. Pada indikator kinerja produksi daging dihitung dari penghitungan jumlah pemotongan ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Buras) dikalikan dengan parameter berat karkas masing-masing ternak tersebut.

Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak diwilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (*edible portion*) selama waktu tertentu. Produksi daging menunjukkan jumlah daging yang diproduksi pada tahun ke-t.

$$PD = K0 \times St$$

Keterangan:

PD = Produksi Daging

K0 = Berat karkas

St = Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat) pada tahun t

1. Realisasi Produksi Daging Tahun 2025, Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Lalu Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Capaian sasaran Meningkatnya Produksi daging dengan Indikator Produksi Daging Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Produksi Daging Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	84.768 Ton	93.611 Ton*	110,43%	Sangat Tinggi

*Angka Sementara

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025 untuk sasaran strategis I : Meningkatnya produksi daging dengan indikator Produksi Daging terlihat bahwa capaiannya melebihi target.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target produksi daging sebesar 84.768 Ton, dan realisasi produksi daging angka sementara sebesar 93.611 Ton dengan tingkat capaian 110,43%.

Realisasi tahun 2025 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) dapat dilihat bahwa produksi daging tahun 2025 meningkat 4%, dimana pada tahun 2025 produksi daging sebanyak 93.611 Ton.

Tabel. 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Daging Tahun 2025 dengan Tahun Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	75.514 Ton	80.276 Ton	106,30%	80.632 Ton	89.916 Ton*	111,51%	84.768 Ton	93,611 Ton*	110,43%

Berdasarkan Tabel 3.3. dapat dilihat bahwa capaian kinerja produksi daging setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan dan secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator Produksi Daging tercatat sebesar 110,43%.

Penetapan target produksi daging tahun 2025 telah mengalami peningkatan dibandingkan target Renstra. Namun demikian, target tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada saat penetapan target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, angka produksi daging tahun 2024 yang digunakan masih merupakan angka sementara. Angka tetap produksi daging tahun 2024 baru dirilis pada akhir Oktober 2025, sehingga target tahun 2025 masih mengacu pada realisasi sementara tahun sebelumnya.

Secara rinci, pada tahun 2023 realisasi produksi daging mencapai 80.276 ton dari target 75.514 ton, dengan capaian kinerja 106,30%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 89.916 ton dari target 80.632 ton, dengan capaian kinerja 111,51%. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi produksi daging sebesar 93.611 ton dari target 84.768 ton, dengan capaian kinerja 110,43%. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi daging.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2026.

Tabel.3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	87.311 Ton	93.611 Ton	107,22%

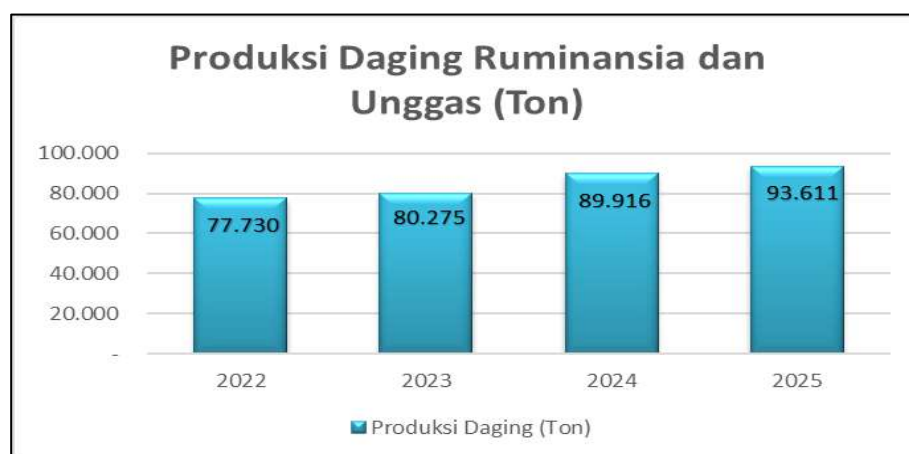
Pada Renstra Tahun 2025-2026 target akhir produksi daging sebanyak 87.311 Ton, sehingga bila dibandingkan dengan realisasi produksi daging sampai dengan tahun 2025 sebanyak 93.611 Ton, maka capaian target sudah tercapai malah sudah melebihi target dengan tingkat capaiannya 107,22%.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

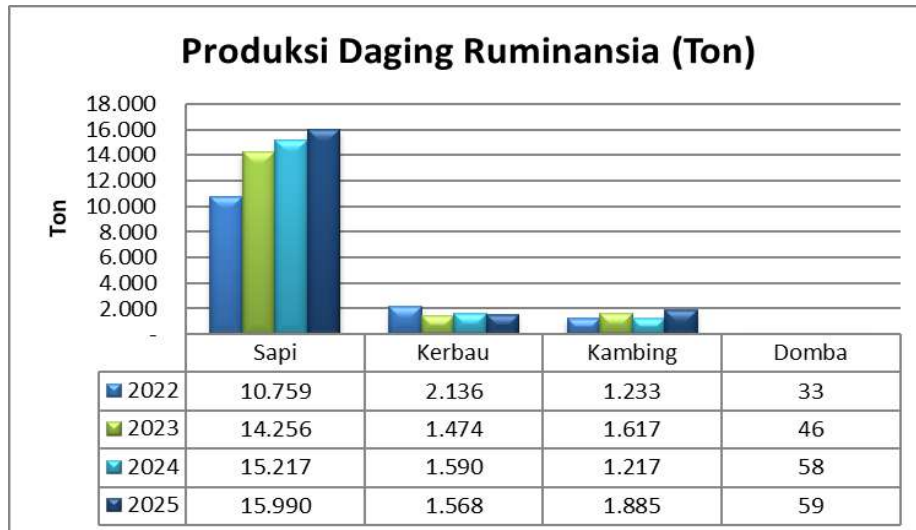
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	84.613Ton	93.611 Ton	110,63%	Sangat Tinggi

Berdasarkan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, target produksi daging Provinsi Riau sebesar 84.613 Ton, dan realisinya mencapai 93.611 Ton dengan tingkat capaian 110,63%. Ini menunjukkan bahwa Produksi daging Provinsi Riau telah melebihi dari yang ditargetkan dengan kategori penilaian sangat tinggi.

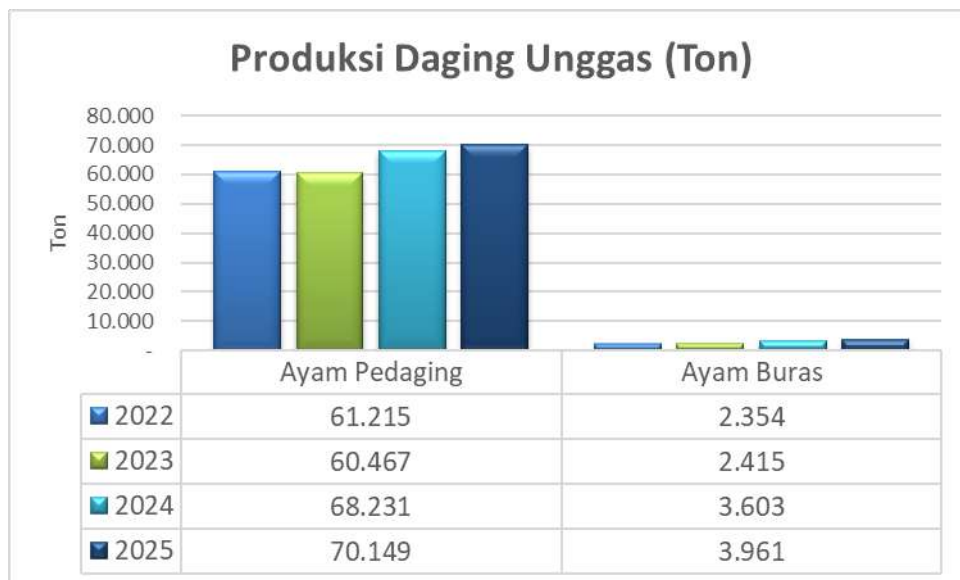
Untuk melihat perkembangan produksi daging per komoditas setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Tahun 2022-2025



Gambar 3.2. Grafik Produksi Ruminansia Tahun 2021-2025



Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Unggas Tahun 2021-2025

Pada gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.3 terlihat adanya peningkatan produksi daging dari tahun 2022 hingga 2025. Produksi daging sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi atau permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan daging meningkat setiap tahunnya. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi.

2. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

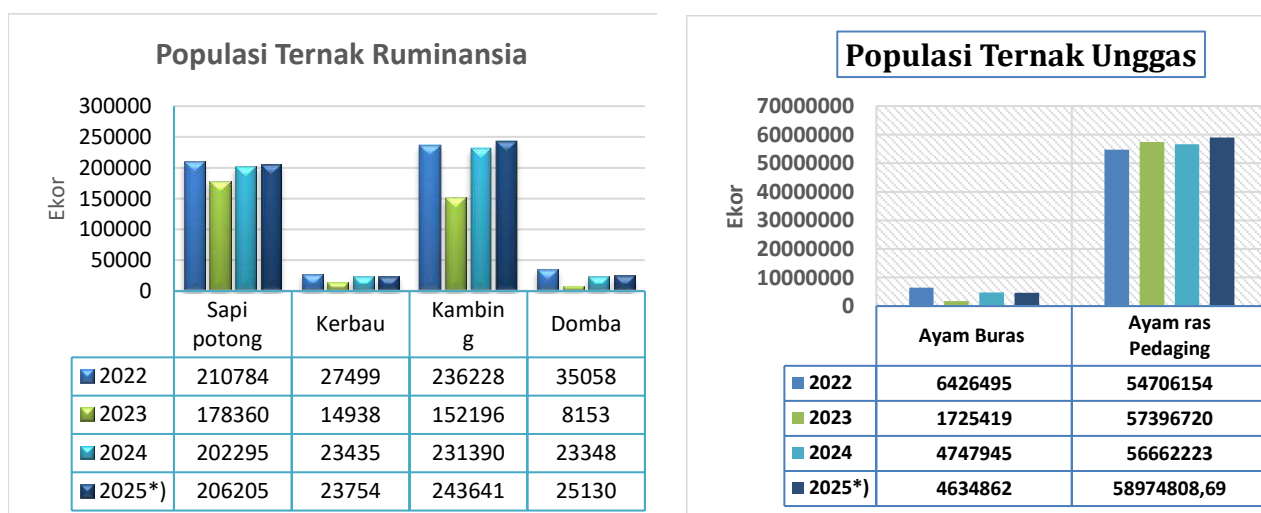
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan dan Kawin alam) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada tabel dan gambar gambar berikut:

Tabel.3.6. Populasi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)			
	2022	2023	2024	2025*)
Sapi potong	210.784	178.360	202.295	206.205
Kerbau	27.499	14.938	23.435	23.754
Kambing	236.228	152.196	231.390	243.641
Domba	35.058	8.153	23.348	25.130
Ayam Buras	6.426.495	1.725.419	4.747.945	4.634.862
Ayam Ras Pedaging	54.706.154	57.396.720	56.662.223	58.974.809

*Angka Sementara



Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas

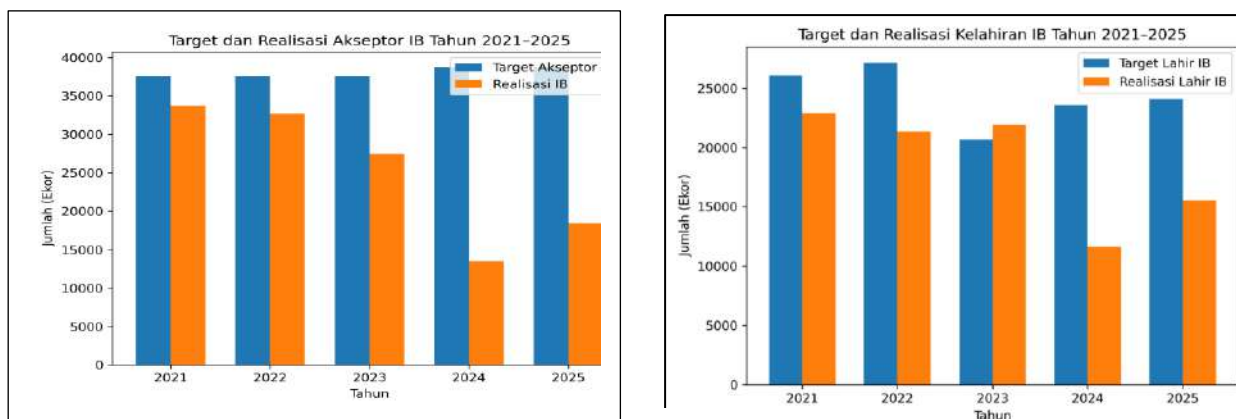
Dari gambar 3.4. dapat dilihat populasi ternak mengalami fluktuasi. Ternak ruminansia sapi, kambing dan domba tahun 2023 populasinya mengalami

penurunan. Populasi ternak tahun 2023 berdasarkan data hasil Sensus Pertanian 2023 yang menghitung pada posisi 1 Mei 2023. Penurunan populasi ternak ruminansia tahun 2023 terjadi karena pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan dan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.1088/VII/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Riau yang membatasi hewan dan produk hewan keluar/masuk dari provinsi lain. Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Riau lebih banyak mendatangkan ternak untuk dipotong dari provinsi lain. Ternak yang ada di Riau hanya sebagian kecil yang dipotong sekitar 20% dari pemenuhan butuhan daging, selebihnya pemenuhan daging berasal dari ternak yang didatangkan dari provinsi lain. Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, ternak dari luar provinsi sangat susah masuk sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, ternak milik Masyarakat di Riau yang banyak dijual dan dipotong sehingga populasi ternak tahun 2023 di Riau menjadi jauh berkurang. Tahun 2024 dan 2025 populasi ternak ruminansia kembali meningkat dengan adanya upaya peningkatan manajemen pemeliharaan ternak, pengendalian pemotongan betina produktif, serta dukungan kegiatan reproduksi ternak di tingkat peternak.

Upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB).

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran

TAHUN	TARGET AKSEPTOR IB (EKOR)	REALISASI AKSEPTOR IB (EKOR)	TINGKAT CAPAIAN %	TARGET LAHIR	REALISASI LAHIR (EKOR)	TINGKAT CAPAIAN %
2021	37.550	33.732	90%	26.065	22.859	88%
2022	37.550	32.711	87%	27.143	21.355	79%
2023	37.550	27.446	73%	20.700	21.951	106%
2024	38.800	13.551	35%	23.569	11.625	49%
2025	38.800	18.444	48%	24.073	15.528	65%



Gambar 3.5. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan dan Kelahiran

Dari Tabel 3.7 dan Grambar 3.5 dapat dilihat bahwa Pada tahun 2021, target akseptor IB ditetapkan sebesar 37.550 ekor, dengan realisasi sebanyak 33.732 ekor atau mencapai 90% dari target. Target kelahiran IB tahun 2021 sebesar 26.065 ekor, dengan realisasi 22.859 ekor atau 88% dari target.

Pada tahun 2022, target akseptor IB tetap sebesar 37.550 ekor, sedangkan realisasi menurun menjadi 32.711 ekor atau 87% dari target. Target kelahiran IB ditetapkan sebesar 27.143 ekor, dengan realisasi 21.355 ekor, sehingga tingkat capaian mencapai 79%.

Pada tahun 2023, target akseptor IB masih sebesar 37.550 ekor, namun realisasi kembali menurun menjadi 27.446 ekor atau 73% dari target. Sementara itu, target kelahiran IB sebesar 20.700 ekor berhasil dilampaui dengan realisasi 21.951 ekor, sehingga tingkat capaian mencapai 106%. Pada tahun 2024, target akseptor IB meningkat menjadi 38.800 ekor, namun realisasi turun cukup tajam menjadi 13.551 ekor atau hanya 35% dari target. Target kelahiran IB pada tahun ini sebesar 23.569 ekor, dengan realisasi 11.625 ekor, sehingga tingkat capaian mencapai 49%. Pada tahun 2025, target akseptor IB tetap sebesar 38.800 ekor, dengan realisasi meningkat menjadi 18.444 ekor atau 48% dari target. Target kelahiran IB ditetapkan sebesar 24.073 ekor, dan realisasi mencapai 15.528 ekor, sehingga tingkat capaian sebesar 65%.

Secara umum, capaian IB menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, kemudian mulai mengalami peningkatan pada tahun 2025, meskipun belum mencapai target. Kondisi ini berdampak langsung pada capaian kelahiran ternak sapi yang juga belum stabil. Capaian terbaik kelahiran IB terjadi

pada tahun 2023, di mana realisasi melampaui target, namun tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan dan Kembali naik pada tahun 2025.

Tidak tercapainya target IB tahun 2021 disebabkan karena terjadinya Wabah Penyakit LSD dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Petugas tidak bisa dengan bebas melakukan aktifitas dilapangan karena khawatir akan menjadi media penularan penyakit pada ternak. Selain itu juga, untuk mengatasi terjadinya penularan penyakit maka dilakukan kegiatan vaksinasi pada ternak dengan mengerahkan seluruh petugas lapangan termasuk juga petugas inseminator IB sehingga aktivitas pelayanan IB juga terkendala. Untuk Tahun 2022, dilaksanakan kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak dengan target seluruh populasi sapi dan kerbau harus didata dan ditandai dengan menggunakan *eartag* sehingga pelayan IB juga menjadi berkurang karena yang bisa dilayani IB hanya ternak yang sudah dilakukan penandaan atau sudah diberi *eartag*. Pada tahun 2023, kegiatan penandaan masih dilanjutkan untuk ternak-ternak yang belum di tandai pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sudah dilakukan pembatasan pelaporan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di isikhnas, pelaporan IB hanya dapat dilakukan dengan melengkapi data identitas ternak nasional *Eartag Secure QR Code* atau mengupdate data identitas ternak yang terdapat pada *Eartag Secure QR Code* ini juga salah satu penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan IB, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025, pelaporan hanya bisa melalui Identik PKH sehingga IB yang dilaporkan semakin sedikit.

Pelaporan kelahiran tahun 2021 sampai dengan 2025 hasilnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 pelaporan kelahiran hanya tercapai 88 % dari target yaitu 22.859 ekor dari 26.065 ekor yang ditargetkan. Pada tahun 2022, pelaporan kelahiran hanya tercapai 79 % yaitu 21,355 ekor dari target 27.413 ekor. Pada tahun 2023 tercapai 79% yaitu 21.591 ekor dari target 27.613 ekor. Tahun 2024 realisasi kelahiran hanya 11.625 ekor dari 32.532 ekor yang ditargetkan dengan tingkat capaiannya hanya 36%. Tahun 2025 kelahiran mulai kembali meningkat namun masih jauh dari target dengan tingkat capaian hanya 65%.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IB tahun 2025

Kab/Kota	Target Akseptor (Ekor)	Realisasi IB (Ekor)	% Capaian IB	Target Kelahiran(Ekor)	Realisasi Kelahiran (ekor)	% Capaian Kelahiran (Ekor)
Kuantan Singingi	6.400	3.672	57,38%	4.145	2.024	48,83%
Indragiri Hulu	6.800	3.347	49,22%	4.155	2.394	57,62%
Indragiri Hilir	1.100	424	38,55%	920	313	34,02%
Pelalawan	1.600	737	46,06%	1.040	253	24,33%
Siak	3.100	2.090	67,42%	1.750	1.967	112,40%
Kampar	7.200	3.099	43,04%	4.270	3.947	92,44%
Rokan Hulu	6.600	4.020	60,91%	3.650	3.687	101,01%
Bengkalis	2.400	338	14,08%	1.700	24	1,41%
Rokan Hilir	1.600	303	18,94%	1.143	402	35,17%
Meranti	250	57	22,80%	230	323	140,43%
Dumai	1.600	332	20,75%	1.000	188	18,80%
Pekanbaru	150	25	16,67%	70	6	8,57%
Total	38.800	18.444	48%	24.073	15.528	65%

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa secara total target akseptor IB sebanyak 38.800 ekor telah terealisasi 18.444 ekor atau mencapai 48 persen. Sementara itu, target kelahiran sebanyak 24.073 ekor terealisasi 15.528 ekor, dengan tingkat capaian sebesar 65 persen.

Secara rinci, Kabupaten Kuantan Singingi mencatat capaian realisasi IB sebesar 3.672 ekor dari target 6.400 ekor (57,38 persen), sedangkan realisasi kelahiran mencapai 2.024 ekor atau 48,83 persen dari target. Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan capaian IB sebesar 49,22 persen, dengan realisasi kelahiran mencapai 57,62 persen.

Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan memiliki capaian IB di bawah 50 persen, masing-masing sebesar 38,55 persen dan 46,06 persen. Realisasi kelahiran di kedua wilayah tersebut juga masih relatif rendah, yaitu 34,02 persen di Indragiri Hilir dan 24,33 persen di Pelalawan. Sebaliknya, Kabupaten Siak menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian IB sebesar 67,42 persen, serta realisasi kelahiran yang melampaui target, yaitu 112,40 persen. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Rokan Hulu, dengan capaian IB 60,91 persen dan kelahiran 101,01 persen, serta Kabupaten Meranti yang

mencatat realisasi kelahiran tertinggi sebesar 140,43 persen, meskipun capaian IB masih relatif rendah (22,80 persen).

Kabupaten Kampar mencatat capaian IB sebesar 43,04 persen, namun realisasi kelahiran cukup tinggi, yaitu 92,44 persen. Sementara itu, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, dan Kota Pekanbaru menunjukkan capaian yang masih rendah baik pada realisasi IB maupun kelahiran, khususnya Bengkalis dengan capaian kelahiran hanya 1,41 persen dan Pekanbaru sebesar 8,57 persen.

Secara umum capaian realisasi kelahiran ternak lebih baik dibandingkan capaian akseptor IB. Beberapa kabupaten bahkan telah melampaui target kelahiran yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pelaksanaan dan pemerataan program IB, terutama di wilayah dengan capaian rendah, agar target akseptor IB dan kelahiran dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pelayanan IB tahun 2025 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas IB dan luasnya jangkauan pelayanan IB serta medan yang cukup berat sehingga dalam sehari hanya bisa melayani ternak 1 atau 2 ekor saja. Selain itu cara pemeliharaan ternak di Provinsi Riau masih semi intensif bahkan di beberapa kabupaten dan kecamatan tertentu pola pemeliharaan secara ekstensif dimana pola pemeliharaan tersebut sangat mempengaruhi capaian IB. Untuk pemeliharaan secara ekstensif peternak tidak dapat melihat tanda-tanda berahi dan terjadi kawin secara alami oleh pejantan. Kurang tertibnya petugas dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan juga mempengaruhi capaian kinerja IB dilapangan. Terkendalnya pelaporan IB dan kelahiran dikarenakan aplikasi identik PKH sering mengalami *maintenance* serta kurangnya koordinasi dengan kabupaten/kota dan anggaran BOP kelahiran tidak mencukupi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 3.6. Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak

Dalam peningkatan populasi ternak di provinsi Riau selama tahun 2025 mengalami banyak kendala terutama karena anggaran untuk pembinaan dan pelayanan kepada peternak jauh mengalami pengurangan bahkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak ada anggarannya. untuk meningkatkan produksi daging, solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak. Dengan terbatasnya anggaran pembinaan dan koordinasi dengan Petugas dilaksanakan melalui *zoom meeting*.
- Melakukan sinkronisasi IB, dimana ternak-ternak sapi dikumpulkan pada suatu tempat dan dilakukan IB secara serentak
- Memberikan pembinaan dan pemantauan kepada peternak/kelompok akan penting pakan dalam usaha budidaya ternak. Pembinaan dilakukan langsung oleh Petugas Petugas Pendamping di lapangan.

Selain peningkatan populasi ternak dengan Inseminasi Buatan (IB), peningkatan produksi dan produktifitas ternak juga dengan peningkatan

kualitas dan kuantitas pakan ternak. Pakan menjadi faktor strategis dalam usaha peternakan dan sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas ternak, serta akan mempengaruhi kualitas produksi hasil ternak. Pakan memegang peranan penting dalam satu usaha peternakan, dimana hampir 70 % biaya yang dibutuhkan dalam suatu usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ternak.

Untuk meningkatkan efisisensi dalam penyusunan pakan dan menjaga mutu pakan diperlukan penerapan system manajemen mutu pakan yang diawali mulai dari pengadaan bahan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan sampai pakan diberikan kepada peternak.

Pakan yang diproduksi baik di tingkat produsen besar maupun di tingkat kelompok yang dimanfaatkan untuk kalangan sendiri atau diperdagangkan harus berpedoman pada persyaratan yang tertera dalam Permentan No. 22 Tahun 2017 dan Kepmentan No. 240/Tahun 2003. Oleh karena itu dalam penerapannya di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap pembuatan untuk menjamin agar pakan yang diproduksi yang diberikan kepada ternak serta diperdagangkan tetap terjaga mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dipersyaratkan.

Berdirinya Unit-unit Pengolahan pakan ternak dan Bank Pakan di tingkat kelompok ternak yang berperan sebagai produsen pakan olahan sendiri, diharapkan menjadi cikal bakal pembentukan pabrik pakan yang dapat menghasilkan pakan komersil untuk diperdagangkan. Untuk itu perlu didampingi dan dilakukan pembinaan agar mutu dan keamanan pakan yang di produksi sesuai dengan standar. (*safety Feed to Safety Food*).



Gambar 3.7. Pembinaan Dan Penyuluhan Kelompok Peternak Oleh Petugas

Permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya peningkatan populasi ternak dan produksi daging ruminansia di Provinsi Riau adalah dikarenakan :

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair.

- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Program yang mendukung peningkatan produksi daging terdiri dari tiga program yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian dengan total anggaran Rp. 5.424.755.853,-

Tabel 3.9. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Daging	Produksi Daging	84.768 Ton	93.611 Ton*	110,43%	5.424.755.853	4.148.055.822	76,47%

Dari Tabel 3.9. dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging, capaian kinerja nya melebihi target dengan tingkat capaian 110,43% dan penyerapan anggarannya hanya 76,47%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien.

Analisis efisiensi dapat dilakukan bila capaian kinerja melebihi 100% dan realisasi anggaran kurang dari 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.10. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya produksi daging	Produksi daging	110,43%	76,47%	23,53 %

Dari Tabel 3.10 terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Produksi Daging sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja produksi daging sebesar 110,43%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 76,47% dengan tingkat efisiensi mencapai 23,53%.

4. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Produksi Daging

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging dengan Indikator Kinerja Produksi daging pencapaiannya ditunjang dari 3 (tiga) Program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk turut mendukung pencapaian peningkatan produksi daging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Daging

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	84.768 Ton	93.611 Ton*	110,43 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	3	3,22	107,33	3.167.696.600	1.905.962.569	60,17
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)	62.000	33.664	54,30	1.462.515.500	1.197.917.639	81,91
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	12	12	100	1.462.515.500	1.197.917.639	81,91
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	10	8,60	86,00	1.592.868.600	599.990.380	37,66
							Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT (ekor)	3	0	0	891.663.600	229.728.880	25,76
						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)	13	13	100	1.592.868.600	599.990.380	37,66
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)	0	0	0	112.312.500	108.054.550	96,21

						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	0	0	0	112.312.500	108.054.550	96,21
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	12	0	0	875.155.253	873.273.253	99,78
						Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	20	16,00	80,00	188.682.400	186.800.400	99,00
							Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	135,62	135,62	100,00	686.472.853	686.472.853	100,00
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0	188.682.400	186.800.400	99,00
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	686.472.853	686.472.853	100,00
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	1	0	0	1.381.904.000	1.368.820.000	99,05
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	50	49	98,00	1.349.620.000	1.336.620.000	99,04
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	661	100	1.349.620.000	1.336.620.000	99,04

						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	60	60	100	32.284.000	32.200.000	99,74
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	0	0	32.284.000	32.200.000	99,74

Dari Tabel 3.11. terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging, program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian.

Outcome yang diharapkan dari ketiga program ini adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran terutama dari Inseminasi Buatan. Pada tahun 2025 kelahiran sapi sebanyak 15.528 sebagai outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2025 capaian sasaran strategis angka produksi daging sudah mencapai target bahkan melebihi target mencapai 110,43%. Produksi daging dari tahun 2021 hingga 2025 cenderung mengalami kenaikan. Sub Kegiatan yang menunjang peningkatan produksi daging pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja 100%, Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian kinerja 100%. Sementara pada sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain tidak ada targetnya karena anggaran yang tersedia hanya untuk pembayaran tunda bayar pengadaan ternak tahun 2024.

Pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian seluruh Sub Kejadiannya tidak ada yang dilaksanakan, dana yang tersedia hanya untuk pembayaran tunda bayar kegiatan tahun 2024. Sedangkan Pada Program Penyuluhan Pertanian, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani capaiannya 100% dimana kelompok petani yang mendapat penyuluhan sebanyak 661 kelompok. Pada sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Korporasi Petani capaian kinerjanya 0% dikarenakan Pembinaan kelompok telah dilaksanakan oleh Petugas Pendamping, namun untuk pembentukan korporasi masih dalam proses karena membutuhkan Pendamping khusus (Manajer) yang mengelola kelompok-kelompok yang akan bergabung dalam korporasi, perlu ada sosialisasi dan pengurusan legalitas untuk membentuk korporasi yang berbadan hukum. Proses

tersebut tidak jadi dapat dilaksanakan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga anggaran yang tersedia.

Secara umum kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi daging terlaksana dengan baik. Capaian kinerja yang tinggi dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada ketiga program tersebut (kecuali pada sub kegiatan yang memang anggarannya tidak tersedia) memberi pengaruh yang besar pada outcome peningkatan populasi dan produksi daging.

SASARAN II: TERJAMINNYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pengukuran sasaran Strategis II yakni Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan 2 (dua) indikator yakni :

1. Persentase Status Kesehatan Hewan
2. Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Indikator Persentase status kesehatan hewan menunjukkan tingkat terkendalinya penyakit hewan di suatu wilayah. Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dihitung dengan rumus jumlah hewan sembuh dibagi jumlah hewan sakit yang mendapat pelayanan hewan dikali seratus persen.

$$\text{Persentase Status Kesehatan Hewan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Hewan Sembuh}}{\text{Jumlah Hewan Sakit yang Mendapatkan Pelayanan Hewan}} \times 100\%$$

Sedangkan indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) diukur dengan menghitung jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dibagi jumlah produk pangan asal hewan yang beredar di kali seratus persen.

$$\text{Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (\%)} = \frac{\text{Jumlah produk hewan yang ASUH tahun berjalan} - \text{Jumlah produk hewan yang ASUH tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah produk hewan yang ASUH tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Kedua indikator ini tidak memiliki target nasional dan tidak ada target yang ditetapkan untuk kedua indikator ini oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga pada pembahasan capaian kinerja tidak dibahas capaian target nasional.

PERSENTASE STATUS KESEHATAN HEWAN

1. Realisasi Persentase Status Kesehatan Hewan Tahun 2025, Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Lalu Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja Persentase Status Kesehatan Hewan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
1	Terjaminnya Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase status Kesehatan hewan	98,77	95,84	97,03%	Sangat Tinggi

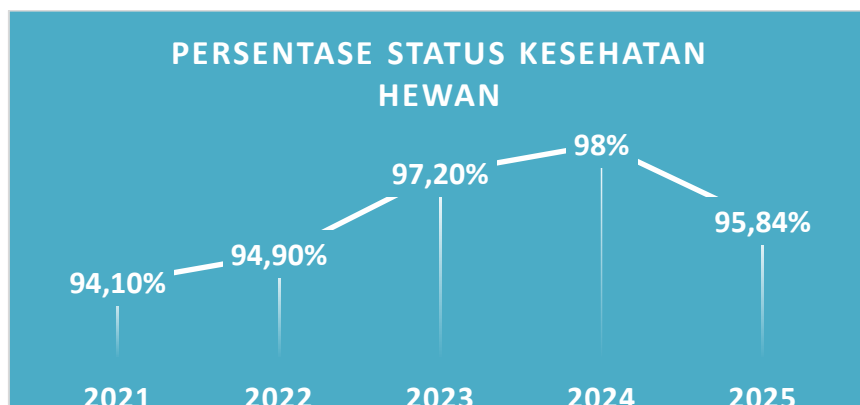
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan, realisasinya 95,84% dengan tingkat capaian kinerjanya 97,03%, walaupun belum mencapai target namun capaiannya termasuk kategori capaian kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Terjaminnya Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase status kesehatan hewan	94,1%	94,9%	97,2%	98%	95,84%

Dari Tabel 3.13. dapat dilihat bahwa persentase status kesehatan hewan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada Tahun 2025 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, Persentase status kesehatan hewan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,8% dimana tahun 2023 persentase status kesehatan hewan sebesar 97,2%. Namun pada tahun 2025 persentase status kesehatan hewan turun 2,16%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran tahun 2025 yang menyebabkan pelayanan kesehatan hewan menjadi berkurang, tidak ada pengadaan obat-obatan, tidak adanya sarana dan

prasarana yang diadakan, serta tidak tersedianya operasional untuk jasa pelayanan kesehatan hewan.



Gambar 3.8 Perkembangan status Kesehatan Hewan

Tabel.3.14.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi s.d.Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
Terjaminnya Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase status kesehatan hewan	98,2%	95,84%	97,60%

Pada Renstra Tahun 2025-2026 target akhir Renstra pada indikator persentase status kesehatan hewan sebesar 98,2%, sehingga bila dibandingkan dengan status kesehatan hewan tahun 2025 dengan realisasi 95,84%, maka untuk tahun 2026 harus lebih ditingkatkan lagi agar pada akhir tahun target akhir renstra dapat tercapai.

Untuk mendukung peningkatan persentase status kesehatan hewan diperlukan peningkatan pelayanan di lapangan yang tentunya memerlukan anggaran untuk pengadaan obat-obatan, sarana dan prasarana, serta penyediaan operasional jasa pelayanan kesehatan hewan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthraks, Hog Cholera, Jembrana, *Lumpy Skin Disease* (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), SE, Helminthiasis, dan Parasit Darah. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak di perbatasan provinsi.

Status kesehatan hewan dipengaruhi oleh tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan secara optimal kepada ternak, vaksinasi ternak dilakukan secara terjadwal (PMK, LSD, Jembrana, dan SE), meningkatnya kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan emerging disease melalui pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan, peningkatan surveilans sebagai pengamanan penyakit hewan, penurunan kasus secara signifikan pada penyakit PMK dan LSD, adanya pengadaan obat-obatan dan vaksin yang mencukupi, dan adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang intens dilakukan oleh petugas sehingga peternak sudah mulai aware terhadap ternak dan penyakit ternak.

2. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Indikator persentase status kesehatan hewan digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis dinas yang II yakni sasaran terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dari Tabel 3.12. dapat diketahui pada realisasi Indikator Kinerja Utama yang II yakni Persentase Status Kesehatan hewan tahun 2025 adalah sebesar 95,84% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,03%. Realisasi ini belum mencapai target namun termasuk kategori penilaian sangat tinggi karena capaian di atas 90%.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthraks, Hog Cholera, Jembrana, Lumpy Skin Disease (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), SE, Helminthiasis, dan Parasit Darah. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak di perbatasan provinsi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular terutama pada saat terjadi wabah LSD dan PMK. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan perundangan dan

penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Selain itu, kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan yang vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi. Tahun 2025, walaupun penyakit LSD dan PMK tidak menjadi wabah lagi, namun upaya pengendaliannya tetap dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi LSD dan PMK. Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan meliputi pengobatan serta vaksinasi pada ternak besar (Jembrana dan SE). Sedangkan untuk vaksinasi LSD dan PMK dalam pelaksanaannya sudah diakomodir melalui dana APBN.

Pelayanan kesehatan hewan di lapangan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang merupakan pelayanan kesehatan hewan terpadu pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis, petugas lapangan atau kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Sasaran pelayanan kesehatan hewan terpadu antara lain ternak sebagai objek pelayanan dengan lebih diutamakan pada ternak-ternak milik petani yang tergabung dalam kelompok petani ternak di wilayah inseminasi buatan serta masyarakat penerima paket-paket bantuan ternak pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pengetahuan mengenai kegiatan surveilans kesehatan hewan sangat penting untuk petugas kesehatan hewan disemua tingkatan guna menentukan langkah pengambilan kebijakan dalam pencegahan, pengendalian dan atau pemberantasan penyakit hewan. Dengan adanya iSIKHNAS petugas kesehatan hewan disemua tingkatan menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan dalam pelaporan serta pengambilan kebijakan. ISIKHNAS merupakan sistem pelayanan informasi dan pelaporan terpadu bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan produksi peternakan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan ISIKHNAS petugas dapat melaporkan secara *realtime*, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui situasi penyakit yang ada di lapangan secara cepat. Selain pelaporan penyakit hewan, ISIKHNAS juga memfasilitasi pelaporan pemotongan, IB, Produksi, dan perbibitan.

Tabel. 3.15. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	45.722	55.560	203.320	63.770	55.024
2	Vaksinasi						
	a. Jembrana	Ekor	23.251	11.482	7.797	4.359	4.936
	b. Rabies	Ekor	19.173	11.505	25.074	23.241	14.877
	c. SE	Ekor	98	605	7.429	2.917	1.889
	d. LSD	Ekor	-	36.719	3.222	1.430	3.635
	e. PMK	Ekor	-	142.033	211.210	78.276	39.513

Sumber data : iSIKHNAS 2025

Dari tabel.3.15 dapat dilihat bahwa tahun 2025 upaya dalam meningkatkan peningkatan persentase status kesehatan hewan berdasarkan laporan yang masuk ke sistem pelaporan iSIKHNAS pelayanan kesehatan telah ditangani sebanyak 65.200 ekor. Pelaksanaan Vaksinasi terhadap sejumlah penyakit antara lain penyakit Jembrana, Rabies, dan Septicemia Epizooticae (SE) telah dilakukan dengan rincian 4.936 dosis vaksin Jembrana pada Sapi Bali, 14.877 dosis vaksin Rabies pada hewan penular Rabies (anjing, kucing kera), dan 1.889 dosis SE pada sapi dan kerbau, 3.635 dosis untuk LSD dan 39.513 dosis untuk PMK.

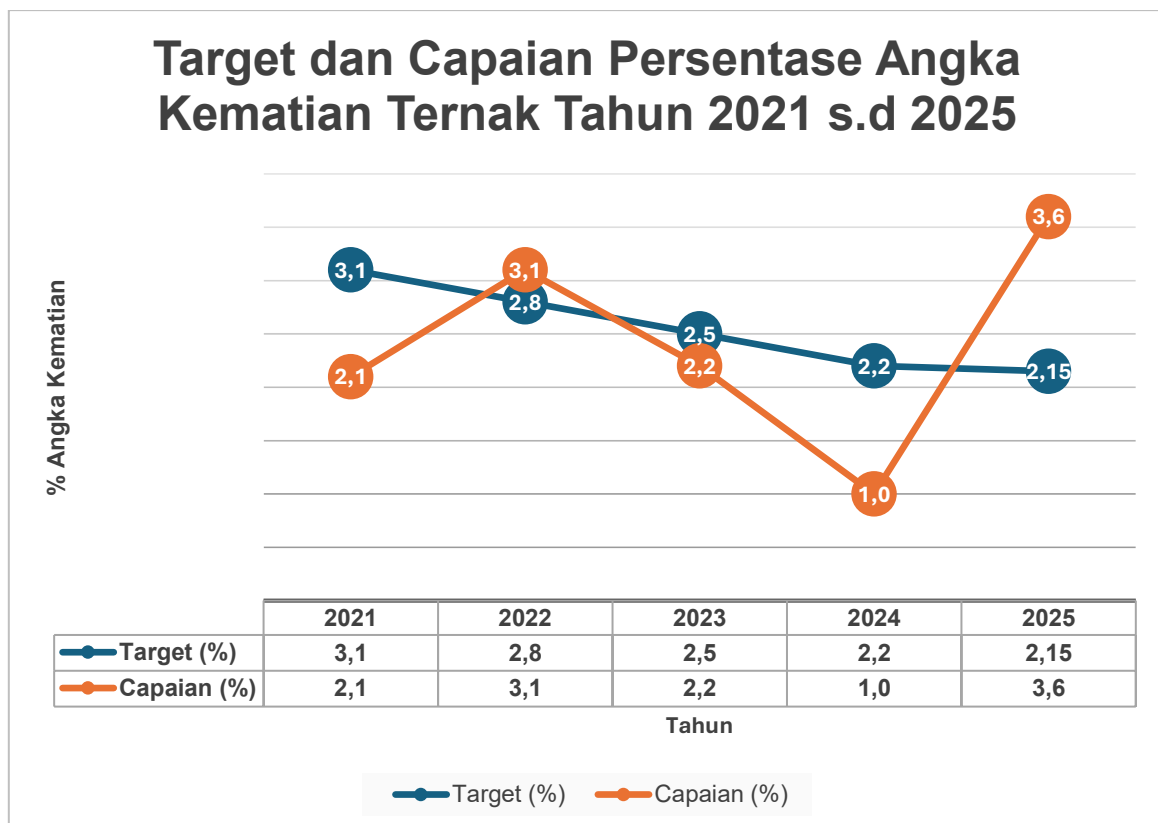
Tabel 3.16 Perbandingan Target, Capaian, dan Pelayanan Keswan Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Keswan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025

Target	% angka sakit	4,1	3,4	2,7	2,20	2,15
	% Kematian	3,1	2,8	2,5	2,20	2,15
	% Kesehatan Hewan	95,9	96,6	97,3	98,00	98,01
Capaian	% angka sakit	5,9	5,1	2,8	2,0	4,16
	% Kematian	2,1	3,1	2,2	1,00	3,60
	% Kesehatan Hewan	94,1	94,9	97,2	98,00	95,84
Pelayanan (ekor)	Jumlah Layanan	45.722	55.650	203.320	63.770	55.024
	- Ternak Sakit	2.698	2.838	5.693	1.275	2.289
	- Ternak Mati	960	1.725	4.473	638	1.981
	- Ternak Sembuh	43.024	52.812	197.627	62.495	52.735

Berdasarkan Tabel 3.16 dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2021 s.d 2023 terjadi peningkatan jumlah ternak yang dilayani. Peningkatan jumlah ternak yang dilayani dikarenakan adanya wabah PMK dan LSD yang menyebabkan banyak ternak yang sakit dan mati. Pada tahun 2024 s.d 2025 terjadi penurunan jumlah ternak yang dilayani. Penurunan jumlah pelayanan di kabupaten/kota terjadi dikarenakan jumlah obat-obatan yang tersedia terbatas dan hanya mengandalkan sisa pengadaan tahun sebelumnya.

Capaian status kesehatan hewan dipengaruhi oleh angka kesakitan dan angka kematian. Dari tahun 2021 sampai tahun 2025 angka kematian mengalami fluktuasi, dimana tahun 2023 angka kematian meningkat menjadi 3,1% kemudian tahun 2023 menurun menjadi 2,2% dan tahun 2024 menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dengan menurunnya angka kematian menjadi 1%. Namun tahun 2025 angka kematian kembali meningkat hingga 3,6%. Pada tahun 2021 capaian angka kematian dibawah target. Hal ini menunjukkan indikasi yang baik dikarenakan adanya dukungan anggaran yang memadai dengan tersedianya obat-obatan dan vaksinasi untuk pelayanan kesehatan hewan, tersedianya operasional untuk jasa pelayanan, dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.



Gambar 3.9. Grafik Target dan Capaian Persentase Angka Kematian Ternak Tahun 2021 s.d 2025

Pada gambar 3.9 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 realisasi angka kematian ternak diatas target dan meningkat dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja yang turun dimana seharusnya angka kematian setiap tahun diharapkan turun dan lebih kecil dari target. Naiknya angka kematian pada tahun 2022 disebabkan adanya wabah PMK dan LSD.

Pada tahun 2023 s.d 2024 persentase angka kematian dibawah target mengindikasikan wabah dapat terkendali. Selain itu, anggaran mendukung untuk terlaksananya pelaksanaan kesehatan hewan seperti pengobatan dan vaksinasi PMK dan LSD secara intensif serta pelaksanaan vaksinasi PHMS lainnya.

Pada tahun 2025 realisasi persentase angka kematian ternak diatas target mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kematian. Peningkatan angka kematian disebabkan karena menurunnya pelayanan kesehatan hewan karena tidak ada pengadaan obat-obatan sehingga obat-obatan tidak tersedia, dan sarana serta prasarana yang kurang mendukung.

Beberapa permasalahan dalam peningkatan status Kesehatan hewan adalah :

- a. Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja (SOTK) melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan sangat bervariasi di Kabupaten Kota, dan tidak jarang merupakan bagian kecil dari suatu Dinas yang berlingkup luas. Sehingga peran Keswan sebagai pelaksana kesehatan hewan di kabupaten/kota belum optimal, baik dari pelaksanaan program, maupun penganggaran.
- b. Masih banyak penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Hewan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga fungsi kesehatan hewan tidak berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada rendahnya komitmen kabupaten /kota dalam hal penanganan penyakit dan pelayanan kesehatan hewan, serta penegakan aturan-aturan yang telah ada.
- c. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.
- d. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan lain-lain berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
- e. Orientasi pengendalian penyakit masih terpusat pada penyakit hewan menular strategis, sedangkan penyakit non strategis seperti helminthiasis, penyakit parasit darah dan lainnya belum mendapat perhatian oleh pemerintah setempat, hal ini berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar.
- f. Berdasarkan data yang didapat dari hasil pengamatan secara aktif ataupun evaluasi dari laporan-laporan yang diterima menunjukkan bahwa penyakit rabies dan AI di Provinsi Riau masih sering muncul dengan tingkat kasus yang berfluktuasi. Untukantisipasi munculnya penyakit sewaktu-waktu, maka dilakukan pengamatan ke lokasi-lokasi yang pernah terjadi kasus penyakit atau daerah rawan secara terprogram.
- g. Masih belum lancarnya penyampaian pelaporan kasus penyakit dari kabupaten/kota, sehingga kasus kejadian suatu penyakit menjadi lambat terdeteksi.
- h. Masih minimnya sumber anggaran baik dari APBN maupun APBD Provinsi Riau, kabupaten/kota dalam penanggulangan penyakit hewan menular yang di disertai

dengan terbatasnya sarana obat hewan dan hanya mengandalkan anggaran dari provinsi.

- i. Belum optimalnya pelayanan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- j. Distributor, depo dan toko sebagai penyedia sarana produksi peternakan diharapkan dapat menyediakan produk obat hewan, vaksin dan lain-lainnya yang berkualitas, maka untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan agar tetap terjaga mutunya. Keterbatasan tenaga pengawas obat hewan yang ada di kabupaten/kota ataupun di Provinsi berakibat kepada pembinaan yang dilakukan tidak optimal.
- k. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area *chek point* pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area *chek point*, tidak dapat difungsikan secara optimal.
- l. Adanya mutasi petugas teknis lapangan ke instansi lain dan digantikan dengan petugas non teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan di lapangan tidak berjalan dengan baik dan optimal.
- m. Lemahnya pengawasan pada pintu masuk (*chek point*) dan banyak peluang masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi menyebabkan terjadinya kembali penularan rabies pada daerah yang sebelumnya sudah bebas rabies.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan Petugas Pelayanan Veteriner (PPV) di lapangan melalui *SMS Gateway* dan iSIKHNAS, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, seperti Rabies, AI dan SE yang berkaitan dengan kondisi kurang

mendukung seperti banjir dan serta cuaca ekstrem dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau realtime.

- b. Agar informasi tentang penyakit dapat diketahui, maka diupayakan pengoptimalan petugas PPV dilapangan yang menginformasikan selain penyakit prioritas sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat.
- c. Keterbatasan SDM diupayakan melalui penerimaan tenaga medis dan non medis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota kabupaten/kota serta dropping THL dari pusat.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.
- e. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.
- f. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area *chek point* perbatasan.
- h. Kurang prioritasnya dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota, maka perlu dilakukan koordinasi yang lebih instensif dan himbauan serta pendekatan agar fungsi keswan dalam hal penanggulangan penyakit menjadi perhatian utama.
- i. Merintis pembebasan bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk dibebaskan penyakit secara bertahap serta melakukan kajian analisa resiko terhadap daerah yang dibebaskan.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Program yang mendukung peningkatan status Kesehatan hewan adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan total anggaran sebesar Rp.3.014.702.691,- khusus untuk indikator Persentase Satus Kesehatan Hewan

Tabel 3.17. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	98,77	95,84	97,03%	3.014.702.691	2.588.874.513	85,87%

Dari Tabel 3.17. dapat dilihat bahwa pada Persentase Status Kesehatan Hewan, capaian kinerja nya belum mencapai target dengan realisasi 95,84% dengan tingkat capaian 97,03% dan penyerapan anggarannya sebesar 85,87%. Dengan tidak tercapainya target maka dikatakan belum ada efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Program/Kegiatan yang mendukung Peningkatan Status Kesehatan Hewan

Pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan didukung oleh Program `Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mendukung pencapaian peningkatan status kesehatan hewan adalah Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi serta Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Tabel 3.18. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Status Kesehatan Hewan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	98,77	95,84	97,03%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)	2,15	3,6	32,55	3.014.702.691	2.588.874.513	85,87
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	10	15,66	156,60	1.611.526.000	1.244.959.860	77,25
					Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12	12	100	23.000.000	20.450.000	88,91
					Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12	12	100	476.126.000	155.479.920	32,66
					Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	36	36	100	1.112.400.000	1.069.032.940	96,10
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	29,2	12,00	41,10	509.180.000	483.916.793	95,04
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	umlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	60	50	83,33	509.180.000	483.916.793	95,04

					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Keswan Kesmavet (Unit)	30	30	100	893.996.691	859.997.860	96,20
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	300	351	117,00	893.996.691	859.997.860	96,20

Dari Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa dalam rangka Menjamin Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk indikator Persentase Status Kesehatan Hewan didukung dengan **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dengan indikator angka kematian ternak. Capaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada indikator Persentase Kematian Ternak capaiannya belum mencapai target dimana angka kematian ternak 3,6% sementara targetnya 2,15% sehingga capaian kinerjanya sangat rendah sebesar 32,55%.

Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan yang mendukung peningkatan Status Kesehatan Hewan adalah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan, Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dengan sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

II. PERSENTASE PENINGKATAN PRODUK HEWAN YANG AMAN SEHAT UTAH DAN HALAL (ASUH)

1. Realisasi Persentase Peningkatan Produk Asal Hewan yang ASUH Tahun 2025, Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Lalu Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Capain sasaran Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Indikator Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Produk Asal Hewan yang ASUH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Produk Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	5%	44,13%	882,6%	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.19 dapat dijelaskan bahwa peningkatan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tahun 2025 sebesar 44,13% jauh melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2025 target peningkatan produk asal hewan yang ASUH sebesar 5% sehingga dengan realisasi 44,13% maka tingkat capaian kinerjanya menjadi 882,6% dengan kategori capaian kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja Persentase peningkatan produk asal hewan yang ASUH tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru yang mulai ada pada tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2026. Pada renstra 2019-2024 indikatornya adalah Persentase produk asal hewan yang asuh yang rumus perhitungannya berbeda dengan indikator pada Renstra 2025-2026.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2026.

Tabel.3.20.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d.Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan produk Asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	10	44,13	441,3%

Pada Renstra Tahun 2025-2026 target akhir Renstra untuk Persentase Peningkatan Produk Asal Hewan yang ASUH sebesar 10%, sehingga bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 44,13% dengan tingkat capaian 441,3% maka capaian target akhir renstra telah jauh melebihi target kategori penilaian kinerja yang sangat tinggi.

2. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Indikator persentase peningkatan produk asal hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja utama yang ketiga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Indikator persentase peningkatan produk asal hewan yg ASUH ini merupakan indikator baru yang baru ada pada renstra Tahun 2025-2026. Pada renstra sebelumnya indikatornya adalah persentase produk pangan asal hewan yang asuh dengan rumus membandingkan antar jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha yang ber NKV dibagi dengan jumlah produksi hewan yang beredar. Tahun 2025 indikaor berubah menjadi persentase peningkatan produk asal hewan yang AUH dengan rumus : $\text{jumlah produk asal hewan yang ASUH tahun 2025} \div \text{jumlah produk asal hewan yang ASUH tahun 2024} \times 100$.

Tingginya peningkatan persentase produk hewan yang ASUH tahun 2025 karena adanya peningkatan jumlah unit usaha yang berhasil di sertifikasi NKV. Peningkatan unit usaha pada tahun 2025 didominasi oleh gudang pendingin, RPH, pengepul telur dan budidaya unggas petelur sehingga produk ASUH yang dihasilkan meningkat. Salah satu unit usaha yang berhasil di sertifikasi adalah PT. Kiat Ananda Cold Storage yang memiliki kapasitas gudang pendingin yang besar sehingga meningkatkan jumlah produk ASUH.

Rumah potong hewan dan Budidaya unggas petelur juga meningkatkan jumlah produksi produk hewan yang ASUH karena berhasil di sertifikasi. Sampai dengan akhir tahun 2024 belum ada Rumah Potong Hewan (RPH) yang ber sertifikat NKV sehingga produksi daging di RPH yang ada di kabupaten kota tidak dimasukkan sebagai produk pangan asal hewan yang ASUH . Tahun 2025 terdapat 2 RPH yg sudah memiliki NKV yaitu RPH Pekanbaru dan RPH Dumai dimana kedua RPH ini merupakan RPH yang menghasilkan produksi daging terbesar dibanding RPH Kabupaten lainnya. Dengan demikian setelah RPH memiliki sertifikat NKV, daging dari ternak yang di potong di kedua RPH tersebut bisa ditambahkan sebagai produk pangan yang ASUH pada tahun 2025.

Salah satu faktor meningkatnya jumlah unit usaha yang berhasil disertifikasi karena adanya peraturan lalu lintas produk hewan. Setiap unit usaha yang ingin melakukan lalu lintas produk hewan di Provinsi Riau, diimbau untuk memiliki sertifikat NKV sehingga unit usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi NKV pada tahun 2025 meningkat. Peningkatan sertifikasi unit usaha mempengaruhi bertambahnya jumlah produk hewan yang ASUH. Program Makan bergizi gratis juga mendorong pelaku usaha seperti supplier produk hewan untuk memiliki sertifikasi NKV agar terpenuhi produk hewan yang ASUH.

Daging, susu, telur serta olahannya adalah produk pangan asal hewan yang menjadi sumber protein yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, selain itu protein ini juga bermanfaat untuk memperbaiki serta memelihara jaringan tubuh. Kandungan gizi yang tinggi mengakibatkan pangan asal hewan termasuk ke dalam produk pangan yang mudah rusak (*perisable food*) dan apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap keamanan produk dapat menjadi bahaya (*hazardous food*) bagi konsumen dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, **Pasal 58 (ayat 1)**, bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi yang dipersyaratkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan. Pemerintah dan unit usaha produk asal hewan wajib untuk melakukan upaya-upaya penjaminan produk hewan sehingga memenuhi persyaratan dari segi kelayakan, keamanan, kesehatan, keutuhan maupun kehalalan bagi produk yang dipersyaratkan.

Pasal 58 (ayat 2), pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu pengedaran setelah pengawetan. Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting dilakukan demi melakukan penjaminan kepada konsumen bahwa produk yang diterima adalah produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi produk yang dipersyaratkan.

Penerapan pengawasan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk hewan dilakukan secara konsisten menurut aturan dan standar operasional yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). NKV merupakan bukti tertulis pemerintah terhadap penerapan higiene sanitasi dan keamanan, serta mutu produk. **Pasal 60 (ayat 1 dan 2)** menyatakan setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV. Unit usaha yang sudah memenuhi syarat melalui pembinaan oleh kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan NKV akan dilaksanakan audit sertifikasi NKV oleh Auditor NKV provinsi. Selanjutnya setelah unit usaha menerapkan praktik higiene sanitasi mendapatkan sertifikat NKV sesuai dengan levelnya (level 1 : sangat baik, level 2: baik, dan level 3 : cukup). Unit usaha yang sudah bersertifikat NKV akan dilakukan surveilans oleh tim provinsi. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh NKV.

Pada praktik di lapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar manajemen atau cara yang baik dalam penanganan produk/penerapan higiene sanitasi dan penjaminan keamanan produk serta pemotongan hewan ternak yang dilakukan di RPH menimbulkan dampak atau resiko buruk terhadap keamanan produk atau mutu serta kesehatan manusia. Selain faktor manajemen usaha, biaya produksi dan nilai ekonomi produk memicu munculnya praktik penyimpangan kesmavet. Bentuk penyimpangan penerapan persyaratan higiene sanitasi dan keamanan pangan yaitu masih ditemukannya proses penangangan karkas di rumah potong hewan yang dilakukan di lantai atau pemotongan hewan dilaksanakan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang tidak resmi dikarenakan kondisi RPH kurang layak (kondisi fisik seperti “bangunan, peralatan” dan kondisi operasional, sarana, higiene dan sanitasi, lingkungan serta suplai air bersih), penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak

memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging di pasar tradisional yang tidak menggunakan sistem penyimpanan dingin, pengawasan olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal, dll) serta ketidakpatuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang ASUH adalah :

1. Pemetaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait program dan kegiatan lingkup bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum bersinergi sehingga dalam penjabaran dan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik antara provinsi dan kab/kota.
2. Advokasi Pengawasan Keamanan Produk Hewan dapat dilakukan dengan baik pada unit usaha, RPH-R dan TPH namun terhadap praktik penindakan hukum terhadap penyimpangan pada mata rantai penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH belum terlaksana.
3. Audit sertifikasi dilakukan dengan pemenuhan persyaratan administrasi teknis. Pemenuhan administrasi dilaksanakan secara online yaitu dengan integrasi antara OSS (Online Single Submission) dengan SISNAS NKV. Dalam pelaksanaannya kendala yang sering terjadi yaitu KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) milik unit usaha penyedia produk hewan pada sistem OSS yang belum sesuai dengan KBLI yang dapat diakses oleh sistem SISNAS NKV.
4. Kesadaran pelaku unit usaha terhadap penerapan higiene sanitasi, keamanan dan mutu pangan yang masih belum merata. Faktor penyebab adalah biaya produksi/operasional unit usaha yang tinggi dan kebijakan manajemen pada unit usaha.
5. Masalah utama di Rumah potong hewan setelah dilaksanakan Sosialisasi Restrukturisasi Management Rumah Potong Hewan dan advokasi Restrukturisasi Management Rumah Potong Hewan adalah pada bangunan RPH serta SDM di RPH.

6. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi sehingga tidak terbentuknya kader siaga zoonosis.
7. Fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum memadai sehingga masih kurangnya kesejahteraan hewan baik di rumah potong maupun di tempat budidaya ternak.
8. Kurang optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum pengendalian betina produktif sehingga masih ada beberapa rumah potong yang masih melakukan pemotongan betina produktif.
9. Data pelaporan pemotongan yang masih kurang optimal dikarenakan petugas tidak melakukan pelaporan data dan ada beberapa data yang tidak terbaca di aplikasi iSIKHNAS.
10. Parameter pengujian sampel yang telah diambil tidak dilaksanakan pengujian karena adanya rasionalisasi anggaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah :

1. Melakukan pemetaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait program dan kegiatan lingkup bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Sosialisasi mengenai proses advokasi regulasi terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilakukan kepada seluruh *stakeholder*.
3. Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota/kab terkait proses perizinan di sistem OSS, selanjutnya koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang membidangi sistem SISNAS NKV, serta dilakukan *follow-up* rutin terhadap unit usaha yang mengajukan permohonan NKV.
4. Kegiatan Pengawasan dan sosialisasi serta edukasi kepada *stakeholder* kesmavet dilakukan secara optimal selanjutnya juga dengan pengawasan lalu lintas bidang.
5. Memberikan rekomendasi fasilitasi halal untuk RPH-R pemerintah ke Kementerian Dalam Negeri dan rencana bimbingan teknis juleha sebagai peningkatan kualitas SDM untuk RPH-R Pemerintah.
6. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kesadaran, sosialisasi edukasi kepada *stakeholder* kesmavet serta penguatan jejaring pengawasan lintas bidang

7. Meningkatkan pengetahuan SDM lingkup bidang Kesehatan masyarakat veteriner mengenai tata cara pengajuan NKV, tata cara pengajuan Sosialisasi registrasi Produk Hewan agar dapat disebarluaskan ke para pelaku usaha
8. Mengoptimalkan sosialisai terkait pentingnya kesejahteraan hewan yang mana perlakuan terhadap hewan yang dipelihara untuk diproduksi pangan, berdampak kepada kesehatan manusia.
9. Mengoptimalnya edukasi terkait betina produktif dan memaksimalkan pengawasan dan penegakkan hukum pengendalian betina produktif.
10. Melakukan pelaporan data secara manual, direkap serta dilaporkan ke Dinas Provinsi oleh petugas kabupaten/kota sehingga data tidak hanya diupload ke iSIKHNAS.
11. Melakukan pengiriman sampel yang cepat dan tepat dengan pilihan pengiriman paket satu hari sampai.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Program yang mendukung produk asal hewan yaKegng ASUH adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan total anggaran Rp.75.445.000,-.

Tabel 3.21 Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan produk Asal Hewan yang ASUH	5%	44,13%	882,6%	75.445.000	25.237.000	33,45%

Dari Tabel 3.21. dapat dilihat bahwa pada persentase peningkatan produk asal hewan yang ASUH, capaian kinerja nya melebihi target dengan tingkat capaian 882,6% dan penyerapan anggarannya hanya 82,30%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien.

Analisis efisiensi dapat dilakukan bila capaian kinerja melebihi 100% dan realisasi anggaran kurang dari 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.22. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Persentase Peningkatan Produk Asal Hewan Yang ASUH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan produk Asal Hewan yang ASUH	882,6%	33,45%	66,55%

Dari Tabel 3.22. terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Peningkatan Produk Asal Hewan yang ASUH sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja 882,6% jauh melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 33,45% dengan tingkat efisiensi mencapai 66,55%.

4. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Peningkatan Produk Asal Hewan yang ASUH

Peningkatan produk asal hewan yang ASUH pencapaiannya ditunjang dari Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan dan Kegiatan Pengawasan Produk Hewan dengan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan.

Berdasarkan Tabel 3.23 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Persentase Peningkatan Produk Asal Hewan yang ASUH, dapat dijelaskan bahwa sasaran *Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner* menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Indikator kinerja utama berupa *Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)* ditargetkan sebesar 5% pada tahun 2025, namun realisasi mencapai 44,13 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 882,6%, yang mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan telah melampaui target secara signifikan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu produk asal hewan.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran tersebut. Indikator persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan higiene sanitasi,

mutu, dan keamanan produk ditargetkan sebesar 10 persen, dengan realisasi sebesar 10,53 persen atau capaian kinerja 105,30 persen. Dari sisi keuangan, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.75.445.000,- dengan realisasi Rp.25.237.000,- sehingga capaian keuangan tercatat sebesar 33,45 persen.

Sub kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan serta Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan juga menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target. Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan ditargetkan sebanyak 10 wilayah, dengan realisasi 23 wilayah atau capaian 230 persen. Sementara itu, jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner ditargetkan sebanyak 35 unit, dengan realisasi 37 unit atau capaian 105,71 persen. Kedua sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran masing-masing sebesar Rp67.945.000 dengan realisasi Rp18.737.000, sehingga capaian keuangan berada pada angka 27,58 persen.

Serapan anggaran yang rendah dikarenakan kebijakan penghentian perjalanan dinas mengingat kondisi keuangan yang tidak tersedia untuk dicairkan, sehingga yang awalnya pembinaan, pengawasan dan audit dilaksanakan untuk unit usaha yang ada di kabupaten/kota, akhirnya dilaksanakan pada unit usaha yang ada di kota Pekanbaru saja dengan tidak mencairkan perjalanan dinasnya. Jadi walaupun anggaran yang tersedia sangat minim namun target kinerja dapat tercapai bahkan melebihi target.

Tabel 3.23. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RELISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGA N
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2. Persentase Peningkatan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (%)	5,00	44,13	882,60%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	10	10,53	105,30	75.445.000	25.237.000	33,45
					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar (Wilayah)	10	23	230	67.945.000	18.737.000	27,58
					Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	35	37	105,71	67.945.000	18.737.000	27,58
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	29,2	12,00	41,10	7.500.000	6.500.000	86,67
					Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1	1	100	7.500.000	6.500.000	86,67

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 alokasi dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.60.837.771.006,-dan berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, pagu anggaran menjadi Rp.45.236.421.259,-. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2025 memiliki 5 Program dengan realisasi keuangan sebesar Rp 40.858.862.340,- dan dengan tingkat capaian 90,32%.

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025

PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.167.696.600	1.905.962.569	60,17%
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	875.155.253	873.273.253	99,78%
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.090.147.691	2.614.114.513	84,60%
4	Program Penyuluhan Pertanian	1.381.904.000	1.368.820.000	99,05%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.721.517.715	34.096.692.005	92,85
TOTAL		45.236.421.259	40.858.862.340	90,32

Dari Tabel 3.24. dapat dilihat realisasi anggaran per program sebagai berikut :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian jumlah pagu Rp. 3.167.696.600,- dengan realisasi Rp. 1.905.962.569,-(60,17%).
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pagu Rp. 875.155.253,- dengan realisasi Rp. 873.273.253 dengan Tingkat capaian 99,78%.
- Program Penyuluhan Pertanian pagu Rp.1.381.904.000,- dengan realisasi Rp. 1.368.820.000,- dengan Tingkat capaian 99,05%

- d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pagu Rp. 3.090.147.691,- dengan realisasi Rp. 2.614.114.513,- dengan tingkat capaian 84,60%
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp. 36.721.517.715,- dengan realisasi keuangan Rp. 34.096.692.005,- dengan Tingkat capaian 92,85%.

Bila dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 dengan pagu anggaran tahun 2024 terdapat penurunan yang besar dimana tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp.60.837.771.006,- sedangkan tahun 2025 hanya Rp. 45.236.421.259,- turun hingga 25,64%. Belum lagi anggaran tahun 2025 ini sebagian anggarannya untuk membayar tunda bayar tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Langkah Strategis

4.1. Kesimpulan

- a. **Peningkatan produksi daging** di Provinsi Riau pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi produksi daging sebesar 93.611 ton telah melampaui target sebesar 84.768 ton dengan capaian kinerja 110,43 persen. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan populasi ternak, dukungan pakan, serta kegiatan pendukung lainnya meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
- b. **Status kesehatan hewan** secara umum masih berada pada kategori sangat tinggi. Persentase status kesehatan hewan tahun 2025 tercatat sebesar 95,84 persen dengan capaian kinerja 97,03 persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis tetap berjalan dan mampu menjaga stabilitas kesehatan hewan di wilayah Provinsi Riau.
- c. **Pelayanan kesehatan hewan dan surveilans penyakit** telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengendalian wabah penyakit hewan menular. Penurunan kasus penyakit strategis seperti PMK dan LSD dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, serta pemanfaatan sistem pelaporan iSIKHNAS berperan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
- d. **Peningkatan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)** menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Persentase peningkatan produk hewan ASUH jauh melampaui target yang ditetapkan, yang menandakan meningkatnya kepatuhan unit usaha terhadap standar higiene sanitasi, keamanan pangan, dan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- e. **Efisiensi penggunaan anggaran** pada beberapa sasaran strategis, khususnya peningkatan produksi daging, menunjukkan hasil yang positif. Capaian kinerja yang melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 100 persen menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara

efektif dan efisien, meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran pada sektor kesehatan hewan dan pelayanan lapangan.

4.2. Langkah Strategis

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada indikator produksi daging, status kesehatan hewan, dan produk asal hewan yang ASUH, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan peningkatan populasi ternak melalui optimalisasi reproduksi, terutama Inseminasi Buatan (IB) dengan menggunakan semen beku sexing dan penetapan kawasan perbibitan ternak dan kawasan pengembangan sapi potong menjadi prioritas utama. Selain itu, pengembangan pakan ternak berbasis potensi lokal, peningkatan mutu hijauan pakan ternak, serta penguatan manajemen budidaya ternak diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi daging.
- b. Upaya peningkatan status kesehatan hewan akan difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan hewan di lapangan melalui penyediaan obat-obatan, vaksin, sarana prasarana, dan dukungan operasional petugas. Penguatan surveilans penyakit, peningkatan kewaspadaan dini, serta optimalisasi peran Puskesmas dan sistem iSIKHNAS akan terus dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular strategis.
- c. Peningkatan mutu dan keamanan produk asal hewan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan unit usaha produk hewan agar memenuhi persyaratan teknis higiene sanitasi dan keamanan pangan. Peningkatan jumlah unit usaha bersertifikat NKV serta pengawasan peredaran produk hewan di pasar dan jalur distribusi menjadi fokus utama untuk menjamin perlindungan konsumen.
- d. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan lintas daerah akan diperkuat melalui peningkatan fungsi check point, koordinasi lintas sektor, serta penegakan persyaratan administrasi dan teknis. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular dan menjamin keamanan pangan asal hewan.

- e. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi petugas teknis peternakan dan kesehatan hewan akan terus dilakukan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota serta peningkatan dukungan anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.
- f. Pada indikator kinerja persentase peningkatan produksi daging dan persentase peningkatan produk asal hewan yang ASUH yang capaiannya telah melebihi target bahkan melebihi target renstra, maka ke depan perlu dilakukan perubahan target dengan meningkatkan target melebihi dari capaian tahun 2025 pada dokumen perencanaan baik itu di Renja ataupun di Renstra. Sebagai tahap awal bila dokumen perencanaan belum ada perubahan maka perbaikan target dilakukan pada perjanjian kinerja.